

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.1 tentang kerugian yang dialami oleh para korban bencana alam membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok berupa tempat tinggal, air bersih, pakaian, dll. Hal tersebut dikarenakan rusaknya tempat tinggal, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Untuk itu diperlukannya bantuan untuk korban bencana agar para korban bencana dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Menurut UU nomor 24 tahun 2007 tentang pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan lingkungan dalam penanggulangan bencana yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
2. Pangan
3. Sandang
4. Pelayanan kesehatan
5. Pelayanan psikososial
6. Penampungan dan tempat hunian

Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2008 pelaksanaan bantuan bencana dilakukan oleh BNPB / Tim Pelaksana Pemberi Bantuan. Bantuan bencana dilakukan melalui proses Penyusunan Daftar Penerima Bantuan, Penilaian Kebutuhan, Penentuan Jumlah Bantuan, Pendistribusian Bantuan, Pencatatan dan Pelaporan. Proses tersebut dilakukan bertujuan agar bantuan bencana yang akan diterima tepat sasaran, sehingga jiwa yang terpapar bencana dipastikan menerima bantuan. Namun situasi pasca bencana terkadang menyulitkan BNPB / Tim Pelaksana Pemberi Bantuan untuk melakukan proses pelaksanaan pemberian bantuan. Hal itu disebabkan karena banyak infrastruktur dan kendaraan yang rusak akibat terjadinya bencana. Sehingga proses seperti perhitungan jiwa terpapar, Penyusunan Daftar Penerima bantuan menjadi lama dan jumlah bantuan bencana yang akan didistribusikan menjadi sulit untuk dihitung.

Seperti bencana Tsunami yang menghantam daerah sekitar Pesisir Banten dan Lampung terjadi pada tanggal 21 Desember 2018. Bencana tsunami tersebut disebabkan oleh letusan gunung Anak Krakatau yang terjadi di Selat Sunda. Tercatat 430 orang meninggal dan 7.202 orang terdampak akibat bencana tsunami ini (Tubagus Solihuddin, 2020). Tak hanya menyebabkan korban jiwa, tercatat infrastruktur yang berdampak

adalah 882 rumah rusak, 73 Penginapan rusak, dan 60 warung milik warga rusak. Selain itu pula 1 dermaga rusak akibat tsunami yang terjadi di provinsi banten ini (BNPB, 2018).

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia melalui BNPB memberikan bantuan untuk korban bencana tsunami di Banten. Bantuan berupa 804 dus air mineral, 115 dus biskuit, serta 40 dus sereal cepat saji diserahkan pada tanggal 27 Desember 2020. Selanjutnya bantuan kembali di salurkan melalui BNPB untuk korban bencana di Banten berupa 2.630 dus air mineral, 598 dus minuman berenergi, 100 dus susu, 200 dus makanan ringan, 40 dus sereal siap saji, 140 dus mi instan serta 14 dus lampu darurat pada 31 Desember 2018 (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, Siaran Pers 2019).

Selain itu bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana tsunami, juga datang dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang. Bantuan tersebut disalurkan kepada BNPB yang diharapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana tsunami. Bantuan tersebut diantaranya berupa bahan sembako, obat – obatan, popok bayi, pembalut wanita, air bersih, makanan siap saji, serta pakaian dan selimut dan tak hanya itu bantuan juga berupa sumbangan uang yang berasal dari Duta BPJS Kesehatan. Bantuan tersebut disalurkan pada tanggal 25 Desember 2018 (BPJS Kesehatan, Siaran Pers 2018).

Namun BNPB mengatakan bantuan untuk masyarakat Banten yang terdampak oleh bencana tsunami masih belum merata dan masih memerlukan bantuan. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa masyarakat Banten yang terdampak bencana tsunami masih memerlukan kebutuhan dasar sehari – hari baik itu berupa makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, selimut, tikar, tenda keluarga, peralatan dapur dan juga perlengkapan untuk bayi. Berdasarkan data dari BNPB, Banten merupakan provinsi yang sangat terdampak paling parah khususnya kabupaten Pandeglang. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terkena dampak dari bencana tsunami dan memerlukan bantuan sehingga distribusi bantuan bencana haruslah dapat merata (Kompas, 2018).

Selain itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho juga menjelaskan terdapat kendala pada saat distribusi bantuan

bencana tsunami Banten untuk masyarakat yang terkena dampak. Kendala tersebut diantaranya adalah cuaca yang buruk, ketersediaan alat berat yang kurang, wilayah untuk distribusi luas, ketersediaan alat derek yang juga tidak mencukupi. Cuaca yang buruk membuat tim penyelamat dan BNPB kesulitan untuk mengevakuasi korban yang masih ada di laut dan juga sulit untuk mendistribusikan bantuan bencana. Sutopo Purwo Nugroho mengatakan gelombang laut yang tinggi membuat tim penyelamat kesulitan untuk menjangkau para korban dan juga cuaca yang ekstrem seperti hujan yang lebat membuat proses distribusi bantuan bencana terhambat. Bahkan terdapat wilayah yang terkena banjir akibat dari hujan yang terus menerus turun. Ketersediaan alat berat yang kurang membuat proses evakuasi reruntuhan bangunan menjadi lambat. Ketersediaan alat berat tersebut juga untuk membuka akses jalur yang terputus. Lalu wilayah untuk distribusi yang luas membuat BNPB kesulitan untuk menjangkau daerah tersebut dan sulit untuk menangani secara bersamaan. Dan kurangnya alat derek membuat evakuasi kendaraan yang rusak dijalanan akibat bencana tsunami menjadi lambat. Sehingga akses jalan tertutup membuat tim penyelamat dan BNPB kesulitan untuk menjangkau wilayah yang memerlukan bantuan. (Liputan 6, 2018)

Lalu bencana tanah longsor yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2021 di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Sebanyak 14 korban meninggal, tiga diantaranya adalah Komandan Koramil Kecamatan Cimanggung, Kepala Seksi Trantibum Kecamatan Cimanggung Suhada dan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumedang Yedi. Bencana longsor tersebut juga menimpa 14 rumah dan mengakibatkan rusak berat. Ketiga korban diduga tertimbun dan tewas akibat longsor susulan saat evakuasi korban.

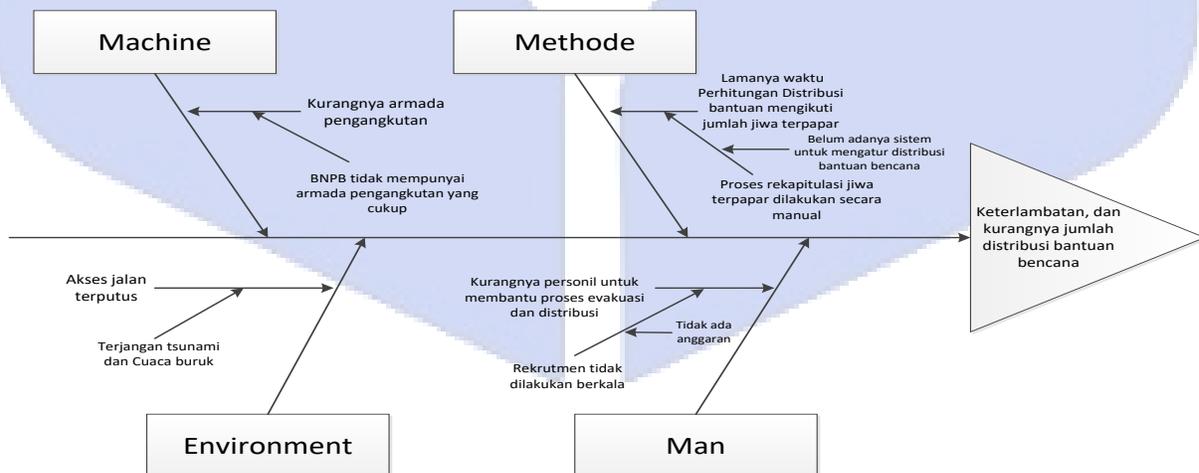
Tebing setinggi 20 meter dan panjang 40 meter longsor diatas pemukiman warga sekitar pukul 15.30 WIB lalu terjadi longsor susulan pada pukul 18.30 WIB. Akibat dari longsor tersebut sekitar 150 kepala keluarga diungsikan ke puskesmas terdekat. Menurut Kepala BPBD Sumedang Ayi Rusmana, intensitas curah hujan yang tinggi yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor ini.

Dilansir dari Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, 1 jembatan dan sejumlah jalan terputus akibat bencana tanah longsor ini. Alat berat menjadi kebutuhan yang mendesak, untuk mengangkat timbunan tanah dan

mengangkat reruntuhan bangunan. BPBD setempat juga telah membuat dapur umum guna memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk penanggulangan bencana tanah longsor di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang sebesar Rp 1.053.703.150. Dilansir dari Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Syahabudin, fokus pemerintah adalah untuk memastikan kebutuhan kesehatan dan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi. Bantuan dari Kementerian Sosial terdiri dari bantuan logistic tanggap darurat sejumlah Rp 888.671.350, bantuan berupa beras regular sebanyak 3000 kilogram dengan nilai Rp 31.800.000. Dan juga terdapat santunan untuk ahli waris sebanyak Rp 15 juta/ahli waris dengan total sebesar Rp 165.000.000. Adapun bantuan logistik yang diberikan Kementerian Sosial terdiri dari tenda serbaguna keluarga sebanyak 10 unit, velbed sebanyak 150 unit, matras sebanyak 1200 unit, Kasur sebanyak 600 buah, dan bantuan selimut sebanyak 1000 lembar. Namun, penduduk yang terpapar bencana tanah longsor masih terus memerlukan bantuan berupa makanan, minuman, dan juga toilet umum. Karena rumah para pengungsi bencana semuanya rusak, sehingga sulit untuk penduduk yang terpapar memenuhi kebutuhan dasar seperti, makanan, air bersih, dan toilet umum. Untuk itu para pengungsi berharap kepada BNPB agar dapat mengirimkan bantuan sampai para pengungsi dapat kembali ke rumah masing – masing.

Berdasarkan bencana yang telah terjadi , kendala – kendala yang sering didapati pada saat distribusi bantuan bencana oleh BNPB digambarkan dalam diagram sebab – akibat pada Gambar 1.1 di bawah ini :



Gambar 1. 1 Diagram sebab - akibat keterlambatan dan kurangnya jumlah distribusi bantuan bencana

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

Bantuan sangat dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Bantuan tersebut guna memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana. Bantuan bencana tersebut harus didistribusikan secara tepat waktu, tepat jumlah. Selain itu juga bantuan yang didistribusikan haruslah dalam kondisi yang baik saat diterima oleh para korban bencana. Untuk itu BNPB selaku badan yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana haruslah dapat merancang sistem distribusi bantuan bencana yang baik agar distribusi berjalan lancar.

Berdasarkan kondisi diatas maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu merancang suatu sistem yang dapat mendukung pendistribusian bantuan bencana. Sistem tersebut harus mampu menentukan jumlah jiwa yang terpapar jika terjadi bencana di suatu wilayah dan menentukan jumlah bantuan yang dibutuhkan untuk para masyarakat yang terpapar bencana. Oleh karenanya, pada penelitian ini, peneliti membuat usulan sistem distribusi bantuan bencana sebagai usulan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menentukan jumlah jiwa yang terpapar dan jumlah bantuan yang tepat untuk didistribusikan kepada masyarakat yang terpapar bencana.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa jumlah jiwa yang terpapar jika terjadi bencana di suatu kecamatan Indonesia?
2. Berapa jumlah bantuan bencana yang tepat untuk di distribusikan kepada para korban bencana?
3. Rancangan sistem apa yang bisa digunakan untuk mendukung distribusi paket bantuan bencana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jumlah jiwa yang terpapar jika terjadi bencana di suatu kecamatan Indonesia
2. Untuk mengetahui jumlah bantuan yang tepat untuk di distribusikan kepada para korban bencana.
3. Untuk mengetahui rancangan sistem apa yang bisa digunakan untuk mendukung distribusi paket bantuan bencana

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keilmuan

Manfaat bagi keilmuan yaitu mengembangkan pengetahuan tentang sistem aplikasi yang dapat membantu untuk menentukan paket bantuan bencana apa yang tepat untuk di distribusikan kepada para korban bencana.

2. Praktisi

Manfaat bagi praktisi yaitu sebagai usulan tentang penggunaan sistem yang dapat digunakan untuk menentukan paket bantuan yang tepat kepada para korban bencana.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bencana yang terjadi adalah bencana banjir, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi, tsunami, gempa bumi, kekeringan, letusan gunung api, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
2. Distribusi disalurkan dari BPBD Kabupaten menuju kecamatan yang berdampak bencana
3. Bantuan bencana untuk masyarakat yang terpapar bencana digunakan per hari
4. Bantuan disalurkan menggunakan Truk Fuso, Truk Engkel, dan Mobil Box
5. Kondisi jalan dianggap normal

1.6 Jadwal, Tempat, dan Jenis Kegiatan

Adapun kegiatan penelitian ini dilakukan pada :

Waktu Kegiatan : 1 Desember 2020 s/d 31 Januari 2021

Tempat Kegiatan : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilakukan pada website www.bnpb.go.id, Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia) yang dilakukan pada website www.bps.go.id

Jenis Kegiatan : Observasi untuk memperoleh data penelitian tugas akhir

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, Jadwal, Tempat dan Jenis Kegiatan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II STUDI PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai studi literatur yang dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah terkait penelitian ini, dalam penelitian kali ini penulis menguraikan mengenai Distribusi, Perancangan Sistem, Indeks Risiko Bencana.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang menjelaskan langkah – langkah penulis dalam menyusun laporan penelitian ini

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini berisi mengenai pengumpulan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, serta cara untuk mengolah data yang telah didapatkan untuk menjadi suatu informasi yang bisa disajikan.

BAB V ANALISIS

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa dari pengumpulan data dan pengolahan data yang telah dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, serta saran-saran perbaikan pada perusahaan, dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka memberikan informasi mengenai rujukan sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

LAMPIRAN

Halaman yang memuat dokumen terkait pendukung laporan penelitian.

